

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN DANA
KAMPANYE PARTAI POLITIK DITINJAU DARI SEGI GOOD
GOVERNANCE
(Studi Kasus DPW PAN JAWA TIMUR pada Pemilu 2009)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Afiatus Sobrina

0813010165/FE/AK

Kepada

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2012

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN DANA
KAMPANYE PARTAI POLITIK DITINJAU DARI SEGI GOOD
GOVERNANCE
(Studi Kasus DPW PAN JAWA TIMUR pada Pemilu 2009)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi



Diajukan Oleh :

Afiatus Sobrina

0813010165/FE/AK

Kepada

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2012

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kasih dan sayangNya, rahmat dan ridhonya, serta tak lupa juga Salam Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Ditinjau dari Segi Good Governance” (Studi Kasus DPW PAN Jawa Timur pada Pemilu 2009), sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Selesainya penyusunan skripsi ini, sebenarnya tidak lepas dari banyak pihak yang telah membantu, baik dalam motivasi moral, spiritual, tukar pikiran, material dan hal-hal lain yang menumbuhkan kesadaran dalam diri penulis, sehingga banyak melahirkan inspirasi kecerdasan nalar. Dalam konteks ini semua, perkenankan penulis untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka semua yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di UPN “Veteran” Jawa Timur :

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, MP.
2. Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM.
3. Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, M.Si.
4. Dosen Wali penulis, Bapak Drs. Munari, MM.
5. Dosen pembimbing penulis, Ibu Dra. Tituk Diah Widajantie, SE, Maks.

6. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur, Bapak Kuswiyanto.
7. Kepada Keluarga Besar DPW PAN Jawa Timur yang bersedia membantu, Pak Riffa, Mas Mahmudi, Mas Udin, Mas Noval, Mas Hari DPRD, terimakasih atas bantuannya selama saya menyusun skripsi.
8. Kepada kedua orang tuaku, Alm Papa Noer Said dan Mama Arofatul Machmudah, terimakasih atas jasa dan cinta kalian.
9. Kepada Om Ali dan Tante Ita, terimakasih atas bantuannya untuk membiayai kuliahku di UPN "Veteran" Jawa Timur.
10. Kepada keluarga besar Moeslimin, terimakasih atas dukungan dan cinta kalian.
11. Kepada teman-teman dan sahabatku, terimakasih atas dukungan kalian semua.
12. Kepada Aditya Ramadhan kekasihku, terimakasih telah mendampingi dan mendukungku selama ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna untuk semua, saran dan kritik masih banyak diharapkan, karena penulis menyadari tulisan ini masih sangat jauh dari sempurna.

Surabaya, 24 April 2012

PENULIS

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DITINJAU DARI SEGI GOOD GOVERNANCE

(Studi Kasus DPW PAN Jawa Timur pada Pemilu 2009)

Oleh :

Afiatus Sobrina

ABSTRAK

Salah satu wujud perlibatan masyarakat dalam proses politik adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar menghendaki kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting di suatu negara, maka tuntutan akan Good Governance partai politik tidak dapat dielakkan. Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye sangat berperan dalam membantu pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Karena bagaimanapun juga, good governance akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan transparansi dan akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik pada Pemilu 2009. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk menggali dan menjelaskan tentang keterbukaan dan pertanggungjawaban Partai Politik akan Laporan Dana Kampanye yang dibuat saat Pemilu.

Berdasarkan observasi bahwa ditemukan pertanggungjawaban dan keterbukaan DPW PAN Jawa Timur mengenai pelaporan dana kampanye yang disampaikan setiap kegiatan evaluasi internal partai, termasuk sudah efektif dan efisien dalam mengatur program serta pengelolaan keuangan selama Kampanye.

Kata Kunci : Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Partai Politik, Laporan Dana Kampanye.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 FOKUS PENELITIAN.....	7
1.3 PERUMUSAN MASALAH.....	7
1.4 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 HASIL – HASIL PENELITIAN TERDAHULU	9
2.2 LANDASAN TEORI.....	13
2.2.1 PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN.....	13
2.2.1.2 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN.....	14

2.2.1.3	KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN.	15
2.2.1.4	UNSUR – UNSUR LAPORAN KEUANGAN.	17
2.2.2	PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE.	18
2.2.2.1	PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE.	19
2.2.2.2	PILAR-PILAR GOOD GOVERNANCE.	21
2.2.2.3	UNSUR-UNSUR GOOD GOVERNANCE.	23
2.2.2.4	GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA.	25
2.2.3	TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS.	28
2.2.3.1	TIGA DIMENSI AKUNTABILITAS.	30
2.2.3.2	METODE UNTUK MENEGAKKAN AKUNTABILITAS	33
2.2.3.3	HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN AKUNTABILITAS	38
2.2.4	LAPORAN DANA KAMPANYE DAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	40
2.2.4.1	PENGATURAN LAPORAN DANA KAMPANYE	45
2.2.4.2	PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN DANA KAMPANYE	48

2.2.4.3	ANCAMAN UU NO.10 TH 2008 KEPADA PARTAI POLITIK.	51
2.2.4.4	AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE..	51
2.3	KERANGKA PIKIR.	52
BAB 3 METODE PENELITIAN		
3.1	JENIS PENELITIAN.	53
3.1.2	ALASAN KETERTARIKAN PENELITI.	57
3.2	INFORMAN.	59
3.3	LOKASI PENELITIAN	61
3.4	SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA.	61
3.5	TEKNIK ANALISIS.	65
3.6	PENGUJIAN KREDIBILITAS DATA.	66
BAB 4 DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN		
4.1	PENDAHULUAN	69
4.2	SEJARAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA	69
4.3	PARTAI POLITIK DI MASA ORDE BARU	71
4.4	SEJARAH BERDIRINYA PAN DI INDONESIA	73
4.5	PLATFORM PARTAI AMANAT NASIONAL	75

4.6	STRUKTUR ORGANISASI PARTAI AMANAT NASIONAL	77
4.7	SEJARAH BERDIRINYA DPW PAN JAWA TIMUR	77
4.8	SUSUNAN PENGURUS DPW PAN JAWA TIMUR	78
BAB 5 ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN		
DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DITINJAU DARI SEGI		
GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus DPW PAN Jawa Timur pada		
Pemilu 2009)		
5.1	PEMAHAMAN MENGENAI GOOD GOVERNANCE	79
5.2	PENGELOLAAN GOOD GOVERNANCE DI DPW PAN JAWA	
	TIMUR	82
5.3	PEMAHAMAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN DANA	
	KAMPANYE PARTAI POLITIK	90
5.4	TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS MENGENAI	
	PENGELOLAAN LAPORAN DANA KAMPANYE DPW PAN	
	JAWA TIMUR PADA PEMILU 2009.	96
5.5	KETERBATASAN PENELITI	106

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1	KESIMPULAN	107
6.2	SARAN	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu wujud perlibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar menghendaki kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting di suatu negara, maka tuntutan akan Good Governance partai politik tidak dapat dielakkan. Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Birokrasi pemerintahan kita sampai saat ini sangat payah dan sudah menjadi rahasia bersama. Tingkat kepayahan tersebut kemudian berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, hilangnya rasa aman dan pada akhirnya dapat menandakan rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sebagian kelompok masyarakat sudah sampai pada taraf mati rasa. Baginya, keberadaan pemerintah dengan ketiadaannya sudah tidak dapat dirasakan bedanya. Namun, masih banyak yang berpandangan optimis bahwa kondisi saat ini, meski tidak banyak, tetap lebih baik dari masa lalu. Setidaknya masih ada ruang kebebasan untuk menyuarakan masa depan bangsa. Karena itu, perbaikan terhadap birokrasi merupakan hal yang fardlu hukumnya (poerwos.wordpress.com/2008).

Hiruk pikuk kampanye partai politik yang sampai saat ini masih dirasakan masyarakat adalah adanya money politik pada masa kampanye, seperti pembagian uang transport, pembagian uang palsu, sembako, durasi iklan yang berlebihan, bahkan menyewa heli sampai sumbangan pesawat terbang yang digunakan turun ke daerah-daerah untuk kampanye. Belum lagi kemampuan partai politik yang memasang bendera, spanduk, baleho yang begitu besar hingga menutup gapura di seluruh kota. Masyarakat pasti berpikir, dari mana sumber keuangannya?

Pemikiran seperti ini akan tumbuh dan tetap hidup dalam pikiran masyarakat apabila partai politik tidak juga menyampaikan laporan dana kampanye sampai batas waktu yang ditentukan oleh KPU. Sebagai organisasi publik yang hidup dan berkembang dari kepercayaan, partai

politik mungkin masih beripikir tradisional dan tertutup. Padahal publik sebagai pemilih pasti akan mengukur kinerja partai politik dengan pengukuran keuangan dan non keuangan. Dengan pengukuran keuangan, tentu masyarakat sebagai stakeholder berkepentingan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan akan menilai detail sumber dana dan penggunaan dana kampanye serta keuangan partai politik (www.waspada.co.id)

Karakter dasar partai politik adalah meraih kekuasaan atas nama rakyat, yang dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Bila menang dalam pemilu, partai politik akan memegang kekuasaan melalui jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif). Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik melalui kedua jalur tersebut selalu mengatasnamakan rakyat dan berimplikasi luas terhadap kehidupan rakyat. Oleh karena itu, partai politik seharusnya memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan demi rakyat yang diwakilinya bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan. Namun pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok kepentingan, karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang diterimanya (Artikel Dahnil Anzar, 2008) .

Transparency International Indonesia menyebutkan bahwa sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama penegakan demokrasi.

Sayangnya tidak semua partai politik terbuka untuk membeberkan berapa jumlah dana kampanye yang diterima maupun dikeluarkan untuk keperluan selama pemilu.

Transparency International Indonesia memperkirakan banyak dana kampanye pemilihan umum yang tidak dilaporkan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum. Perkiraan lembaga ini didasarkan pada perbedaan nilai belanja kampanye, termasuk belanja media, yang dikeluarkan partai politik dengan dana yang diperoleh selama masa kampanye lalu.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Emmy Hafild, mengatakan bahwa di negara-negara lain, hal seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat pemilihan umum. Bahkan ada negara yang mengindikasikan ini sebagai modus pencucian uang.

Berdasarkan perhitungan Transparency International, selama kampanye yang lalu, PDI Perjuangan paling tidak membelanjakan Rp 241 miliar untuk kampanye. Partai ini merupakan pembelanja kampanye paling besar. Setelah PDIP, Partai Golkar berada di urutan kedua dengan belanja kampanye sebesar Rp 169 miliar. Berdasarkan data yang dilaporkan kedua partai itu ke Komisi Pemilu, saldo akhir dari dana kampanye yang berhasil dikumpulkan PDIP hanya sebesar Rp 111 miliar, sedangkan saldo akhir rekening Partai Golkar dalam pengumpulan dana kampanye hanya sebesar Rp 757 juta.

Laporan yang diterbitkan lembaga itu, seluruh partai yang lolos electoral threshold (ambang batas perolehan suara dalam pemilihan umum) tercatat memiliki perbedaan antara dana yang dipakai kampanye dan perolehan sumbangan. Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya, dihitung mengeluarkan Rp 95 miliar, namun tak mencatatkan sama sekali berapa dana yang mereka dapat. Ini juga terjadi pada Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan dari seluruh partai yang dilaporkan, hanya PDIP dan PAN yang melaporkan identitas penyumbang dan jumlah sumbangannya (www.antikorupsi.org).

Pertanggungjawaban yang sangat minim inilah, maka dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber keuangan partai politik. Sebagai institusi publik, maka partai politik harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik, termasuk secara transparan melaporkan kepada publik sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan partai politik bersangkutan. Karena, melalui transparansi sumber dan pengelolaan keuangan partai politik, maka publik akan mudah mengawasi dan menilai kebijakan serta gerakan politik yang dibuat oleh partai politik. Dengan partai politik yang tidak akuntabel dan transparan, jangan pernah berharap adanya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Artikel Dahnil Anzar, 2008).

Bentuk transparansi dan akuntabilitas partai politik kepada publik atas aktivitas yang dilaksanakannya adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun tentunya harus memenuhi standar agar dapat dipahami secara luas (universal). Laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye sangat berperan dalam membantu pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Karena bagaimanapun juga, good governance akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DITINJAU DARI SEGI GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Laporan Dana Kampanye Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Timur pada Pemilu 2009)”

1.2 FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, hal-hal yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Pemahaman mengenai pencatatan Laporan Keuangan Partai Politik.
2. Menganalisa transparansi dan akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik ditinjau dari segi good governance.
3. Laporan Keuangan yang dimaksud adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Timur pada Pemilu 2009.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan : “Apakah Laporan Dana Kampanye DPW PAN JAWA TIMUR pada Pemilu 2009 telah memenuhi kriteria transparansi dan akuntabilitas ditinjau dari segi good governance??”

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan transparansi dan akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik pada Pemilu 2009.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis : Untuk memperoleh pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye serta hubungannya dengan good governance.
2. Bagi objek yang diteliti : Dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan kebijaksanaan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye dan good governance.
3. Bagi masyarakat : Dapat dijadikan sebagai informasi untuk bahan penelitian bagi yang berminat dalam bidang serupa.